

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri pariwisata saat ini memerlukan peran komunikasi sebagai sarana untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi pariwisata yang ada. Namun, dalam melaksanakan program pengembangan dan promosi potensi pariwisata, sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan komunikasi. Sehingga dengan itu diperlukan perencanaan komunikasi yang optimal dalam program pengembangan dan promosi wisata.

Perencanaan menjadi landasan yang penting dalam melakukan analisis dan merumuskan strategi yang akan diterapkan. Perencanaan memiliki pengaruh yang sangat penting, baik pada tahap pelaksanaan maupun pengawasan, karena melibatkan proses berpikir yang mendalam untuk menentukan langkah-langkah yang akan dijalankan. Sementara itu, Kincaid (1987) melihat komunikasi sebagai proses saling menyampaikan dan menerima pesan antara individu dengan individu lainnya, dengan tujuan agar kedua belah pihak yang terlibat memahami dan memiliki pandangan yang sama tentang ide yang sedang dibahas.

Ferguson (1999) melihat bahwa perencanaan komunikasi sebagai sebuah dokumen tertulis yang merumuskan langkah-langkah yang tepat dan harus diambil. Perencanaan komunikasi juga perlu mempertimbangkan elemen dasar komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan tujuan dan ingin dicapai. Tujuan dari perencanaan komunikasi adalah untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan melalui pendekatan yang terarah dan terukur. Dengan mengadopsi perencanaan komunikasi yang optimal, organisasi dapat mengurangi risiko dan menghindari kesalahan komunikasi.

Philip Lesly (1972) menggarisbawahi pentingnya perencanaan komunikasi dari dua komponen utama dalam perencanaan komunikasi, yaitu bagi organisasi sebagai penggerak komunikasi dan publik yang menjadi sasaran komunikasi. Pentingnya perencanaan komunikasi bagi organisasi adalah untuk mendorong organisasi untuk melakukan riset dan analisis,

merumuskan kebijakan, dan merencanakan program pelaksanaan. Pada sisi publik, perencanaan komunikasi menjadi penting untuk mendorong munculnya kajian-kajian terhadap umpan balik yang muncul dari publik, dan mendorong dilakukannya evaluasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, perbaikan dan peningkatan program organisasi di masa yang akan datang (Cangara, 2013).

Merujuk pada era modernisasi saat ini, kehadiran perencanaan komunikasi elemen yang tak terpisahkan dari proses pengembangan sektor pariwisata, khususnya dalam konteks wisata budaya yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pengembangan pariwisata budaya bertujuan untuk memfokuskan kembali, merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, masyarakat dan wisatawan itu sendiri.

Namun demikian, penting untuk disadari bahwa kemungkinan terdapatnya dampak negatif terhadap aspek sosial budaya yang mungkin akan dialami oleh masyarakat sebagai akibat dari pengembangan pariwisata tersebut patut diperhatikan. Dampak negatif ini ada karena kurangnya pedoman atau perencanaan komunikasi yang sesuai dalam pengembangan wisata budaya, atau mungkin disebabkan karena perencanaan komunikasi dalam pengembangan pariwisata yang tidak sesuai dengan karakteristik wisata budaya (Ruhanen, 2004). Lebih lanjut, hal ini diperparah dengan kebiasaan dalam mengadopsi pendekatan perencanaan komunikasi dalam pengembangan pariwisata umum yang sudah ada, tanpa adanya studi mendalam mengenai arah perencanaan komunikasi dalam pengembangan wisata budaya (Junaid, 2014).

Selain permasalahan dan tantangan yang telah dijelaskan, di Indonesia terdapat 90 ribu lokasi bersejarah, bangunan bersejarah, dan cagar budaya yang memiliki potensi untuk dijaga dan dilindungi dengan cara memanfaatkannya sebagai objek wisata. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memaparkan bahwa terdapat sebanyak 1728 warisan budaya tak benda di Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2022 yang terbagi ke dalam 5 domain

(Direktorat Perlindungan Kebudayaan, 2022). Jumlah ini meliputi 491 warisan budaya dalam domain adat istiadat masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan; 440 warisan budaya dalam domain kemahiran dan kerajinan tradisional; 75 warisan budaya dalam domain pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; 503 warisan budaya dalam domain seni pertunjukan; dan 219 warisan budaya dalam domain tradisi lisan dan ekspresi (Direktorat Perlindungan Kebudayaan, 2022). Namun, menurut Nashrullah (2022) baru sekitar 1.500 situs yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan masih terdapat banyak kendala dalam upaya pengembangannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga ahli di beberapa pemerintah daerah, keterbatasan dana, serta kurangnya dokumen perencanaan komunikasi yang diperlukan untuk mengembangkan cagar budaya menjadi objek wisata budaya yang optimal.

Keseimbangan antara upaya pengembangan destinasi wisata budaya dan pemeliharaan warisan budaya yang menjadi objek wisata harus bisa dilakukan secara bersamaan (Nashrullah, 2022). Hal ini penting karena warisan budaya mencerminkan dinamika manusia yang diwariskan melalui nilai-nilai kehidupan, norma-norma, sejarah, arsitektur, ritual dan gaya hidup suatu kelompok masyarakat. Menurut Direktur Jenderal Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peraturan terkait warisan budaya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini yang secara umum menetapkan kewajiban untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya sebagai objek pariwisata.

Permasalahan di atas mengisyaratkan pentingnya perencanaan program komunikasi yang komprehensif agar pengembangan destinasi wisata tersebut bisa berjalan dengan baik (Wahyuni & Nuraeni, 2023), khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata budaya. Dalam proses pengembangan destinasi pariwisata menuntut keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah dengan mempertimbangkan aspek antisipasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan pedoman destinasi pariwisata

berkelanjutan, yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021.

Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan, pemerintah Provinsi Riau yang dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Provinsi Riau, telah memiliki Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dalam pembangunan pariwisata yang ditujukan untuk setiap objek wisata unggulan yang terdapat di kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Riau, salah satunya wisata budaya (Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2018) berdasarkan peraturan atau pedoman dari Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selain itu, dari pra-penelitian peneliti juga menemukan tujuan dari pembangunan pariwisata salah satunya yaitu untuk mewujudkan pariwisata yang bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam memperkuat citra daerah sebagai pusat pariwisata halal dan budaya Melayu.

Dalam pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau sebagai pemerintah terkait telah menyusun perencanaan komunikasi dengan tujuan untuk memastikan desain dan implementasi program-program pariwisata yang diinginkan. Program pengembangan pariwisata di Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2022, yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi untuk periode tahun 2021 hingga 2035. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sendiri mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024, serta berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya perencanaan komunikasi yang jelas dan sah, diharapkan pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau dapat berjalan lebih terarah dan efektif sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sektor pariwisata budaya di Provinsi Riau diakui sebagai salah satu sektor yang strategis dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Provinsi Riau memiliki keunikan dan nilai sejarah yang sangat berharga, karena merupakan tempat asal dan akar budaya Melayu di Indonesia. Selain itu, wilayah ini juga

kaya dengan warisan budaya Melayu yang beragam. Sejarah yang ada di Provinsi Riau tercermin melalui berbagai momen dan peninggalan sejarah yang masih tersisa hingga saat ini. Monumen dan peninggalan sejarah ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu di wilayah ini dan memiliki daya tarik yang kuat bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi dan memahami lebih dekat kekayaan wisata budaya di Provinsi Riau.

Dengan fenomena yang ada, menciptakan kesempatan strategis bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perencanaan komunikasi dalam pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Dipilihnya Dinas Pariwisata Provinsi Riau sebagai objek material (*locus of interest*) karena organisasi perangkat daerah ini memiliki peran kunci sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan dalam upaya pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan perencanaan komunikasi yang diperlukan untuk mengembangkan potensi wisata budaya di daerah tersebut. Sebagai lembaga pemerintahan yang terlibat langsung dalam industri pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Riau memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan dan keberhasilan sektor wisata budaya di wilayah tersebut.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dalam tulisan ini, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas yaitu: bagaimana perencanaan komunikasi dalam pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perencanaan komunikasi dalam pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada tahun 2023.
2. Menganalisis perencanaan komunikasi dalam pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki manfaat akademik dan praktis, yang termasuk manfaat berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat terkait tinjauan atas teori perencanaan komunikasi model Philip Lesly dalam konteks pengembangan pariwisata budaya. Kemudian hasil penelitian juga diharapkan memiliki manfaat sebagai referensi dan pijakan pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perencanaan komunikasi dalam pengembangan wisata budaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam perencanaan komunikasi dalam pengembangan wisata budaya.

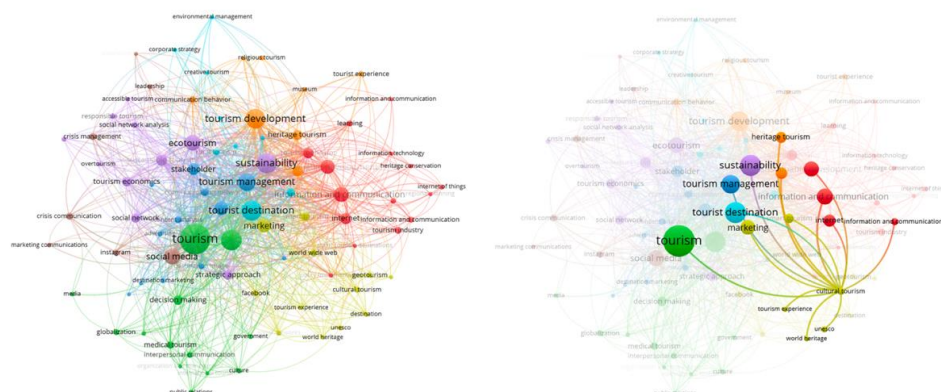
1.5 Kebaruan Penelitian

Kajian mengenai perencanaan komunikasi telah banyak ditulis oleh peneliti terdahulu baik melalui tulisan berbentuk buku, jurnal, tesis maupun disertasi. Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena dapat memberikan landasan dan panduan yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang baru. Analisis terhadap penelitian terdahulu dapat membantu para peneliti menemukan gap atau kebaruan dalam

penelitian sebelumnya, dan menemukan area penelitian yang baru dan inovatif. Hal ini penting untuk menciptakan nilai kebaruan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membantu mendorong kemajuan dalam berbagai bidang penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan perencanaan komunikasi dan pengembangan wisata budaya yang melekat pada latar belakang sosial budaya masyarakat yang ada.

Kumpulan studi terdahulu dikumpulkan melalui *database* penelitian Scopus, dengan kata kunci *communication* dan *tourism*. Berdasarkan hasil pencarian, diperoleh 831 jurnal internasional (terindeks Scopus) dengan rentang tahun 2014-2023 dalam kajian ilmu sosial. Selanjutnya hasil pencarian dari jurnal yang terindeks pada Scopus tersebut, dianalisis menggunakan *software VosViewer*.

Gambar 1. 1 Visualisasi tinjauan Pustaka



Sumber: VOSviewer

Berdasarkan gambar 1, dapat diketahui bahwa selama rentang tahun 2014-2023 penelitian terdahulu banyak membahas terkait *communication*, *tourism*, *marketing*, dan *ecotourism*. Dari hasil analisis tersebut *cultural tourism* masih sedikit dibahas dibuktikan dengan *node* yang jauh dan kecil. Selain itu, kata kunci yang muncul yang memiliki keterhubungan atau *link* dengan *cultural tourism* adalah *tourism management*, dan *marketing*. Sehingga dengan analisis ini dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait perencanaan komunikasi,

pariwisata, dan wisata budaya masih sedikit bahkan belum pernah diteliti secara global.

Selanjutnya peneliti akan menampilkan tinjauan pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap lebih dalam atau menemukan gap atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan.

Kajian terhadap perencanaan komunikasi menandai suatu ranah penelitian yang terus berkembang secara signifikan. Ragam model penelitian yang diperkenalkan mencerminkan kompleksitas dan relevansi fenomena perencanaan komunikasi dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian memfokuskan penelitian pada perencanaan komunikasi dengan konteks politik. Selain itu terdapat fokus perencanaan komunikasi pada ranah iklan dan pemasaran produk, ada yang menghubungkan perencanaan komunikasi sektor kesehatan, hingga perencanaan komunikasi dengan sektor pendidikan. Kehadiran perencanaan komunikasi menjadi sebuah elemen penting dalam pengembangan wisata budaya, dengan ini perlu menjadi fokus organisasi untuk merencanakan pendekatan strategis yang akan diterapkan ke depan.

Nurjannah (2018) yang memfokuskan penelitian mengenai perencanaan komunikasi dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bengkalis, membuat perencanaan komunikasi dengan melibatkan penentuan khalayak, perumusan pesan dalam konteks pengembangan potensi pariwisata, perencanaan media yang relevan, serta evaluasi melalui penerapan model komunikasi sirkuler. Menurut Nurjannah (2018), model komunikasi sirkuler dapat memberikan dimensi dinamis pada perencanaan komunikasi untuk pengembangan potensi pariwisata. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Perwirawati, et al (2022), dengan mendorong aktivitas partisipasi masyarakat dalam membangun dan meningkatkan kualitas desa menuju destinasi wisata berkelanjutan, menjadi peran penting dalam komunikasi untuk mendukung proses perencanaan pengembangan pariwisata di Desa Hilisataro Nandisa. Namun, kedua penelitian ini menunjukkan keterbatasan karena tidak mendalamnya eksplorasi mengenai proses perumusan kebijakan. Padahal,

tahapan perumusan kebijakan di dalam pengembangan pariwisata memiliki peran sentral dalam menentukan strategi-strategi yang akan implementasi.

Temuan lainnya terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Nizam dan Yasir (2022), yang menyoroti perencanaan komunikasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Sei Pakning dalam konteks pengembangan Ekowisata Arboretum Gambut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang berlandaskan pada kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Meskipun demikian, ditemukan aspek krusial yang memerlukan perhatian lebih lanjut, yaitu perlunya keterlibatan lebih banyak pihak terkait dalam inisiatif CSR, salah satu aspek komunikasi pemerintah. Lebih lanjut, implikasinya adalah agar PT Pertamina RU II Sei Pakning dapat menjalin kolaborasi yang lebih efektif dengan pemerintah guna merancang kebijakan dan strategi komunikasi yang secara menyeluruh mendukung perkembangan Ekowisata Arboretum Gambut. Selain itu, penelitian ini mengaplikasikan model perencanaan komunikasi yang dikemukakan oleh Philip Lesly, yang mencakup dua komponen utama, yaitu organisasi dan publik. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak mengeksplorasi aspek publik secara memadai, menyiratkan bahwa penilaian terhadap keberhasilan inisiatif CSR oleh PT Pertamina RU II Sei Pakning mungkin tidak dapat dilakukan dengan sepenuhnya komprehensif.

Dewi dan Hadiwijaya (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perencanaan komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam kampanye "Palembang EMAS" melibatkan dua aspek utama. Pertama, terlibatnya organisasi, khususnya Pemerintah Kota yang bertanggung jawab atas penggerakan kegiatan kampanye. Kedua, fokus kampanye ini adalah pada publik, yang terdiri dari masyarakat sebagai sasaran utama. Dalam penelitian ini, keterlibatan dan partisipasi masyarakat pada perencanaan komunikasi memberikan gambaran tentang dampak komunikasi yang dilakukan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata budaya, Desiana, et al (2021) dalam penelitiannya berfokus dalam upaya untuk memahami dan merangkul warisan budaya sebagai elemen penting dalam pengembangan destinasi

pariwisata. Desiana, et al (2021) menegaskan bahwa komunikasi berbasis budaya dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mempromosikan pengalaman wisata yang berkesan sambil tetap mempertimbangkan dan menjaga integritas lingkungan dan sumber daya destinasi. Menurut Supriadi dan Maharani (2021), peran media komunikasi dalam konteks pengembangan desa wisata di Bali diidentifikasi sebagai sumber dan pusat informasi yang signifikan bagi keberhasilan inisiatif desa wisata dan memberikan dampak. Disisi lain, Desiana, et al (2021) mengungkapkan pemanfaatan media persuasif sebagai alat menunjukkan pemahaman akan kekuatan pesan yang dapat memotivasi dan membentuk perilaku wisatawan. Selain itu, (Ayu, Kemalasari, & Sofia, 2020) dan (Sugiyarto & Amaruli, 2018) mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata budaya dapat dilakukan dengan adanya festival. Seperti dalam penelitian (Ayu, Kemalasari, & Sofia, 2020), Dieng Culture Festival sebagai unsur kebudayaan signifikan yang menjadi daya tarik wisata, mewujudkan kegiatan yang mempersembahkan beragam kesenian dan budaya khas Dieng.

Dari tinjauan pustaka yang dilakukan, menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan penelitian terkait perencanaan komunikasi dalam pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau. Penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada konteks lain, sehingga terdapat peluang untuk mengisi gap pengetahuan ini dengan penelitian yang lebih spesifik. Pentingnya mengeksplorasi proses perumusan kebijakan dalam pengembangan wisata budaya menjadi titik sentral dalam penelitian ini. Selain itu, akan diperluas cakupan penelitian dengan memasukkan peran Dinas Pariwisata Provinsi Riau sebagai pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata budaya di Riau. Terakhir, penelitian ini akan mengatasi ketidak lengkapan informasi mengenai indikator keberhasilan dan evaluasi dalam konteks pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau.

Melalui pendekatan yang lebih spesifik ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman perencanaan komunikasi dalam konteks pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau,

memenuhi kekosongan pengetahuan yang teridentifikasi dalam literatur yang telah ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, masing-masing dengan peran dan fokusnya tersendiri.

BAB I

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kebaruan penelitian, dan sistematika penulisan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian, menjelaskan alasan pemilihan topik, serta merinci kebaruan penelitian baik dari segi teoritis maupun empiris. Bab ini membuka pintu bagi pembaca untuk memahami konteks dan urgensi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

Bab II adalah bagian tinjauan pustaka yang mencakup kerangka pemikiran, kerangka konsep, dan model penelitian. Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar analisis fenomena dan pertanyaan penelitian. Sementara itu, kerangka konsep dan model penelitian memberikan gambaran tentang hubungan antar konsep yang sedang diteliti oleh penulis. Bab ini membantu memahami landasan teoritis dan konseptual penelitian, serta membentuk kerangka kerja yang akan digunakan selama penelitian berlangsung.

BAB III

Bab III, yaitu metodologi yang mencakup beberapa poin penting, termasuk paradigma dan jenis penelitian, metode penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik validasi data, teknik penyajian data, dan limitasi penelitian. Dengan merinci aspek-aspek tersebut, metodologi penelitian menjadi landasan yang jelas untuk memahami bagaimana penelitian ini akan dilakukan, mulai dari perencanaan hingga analisis data.

BAB IV

Bab IV merupakan bagian yang membahas temuan dan pembahasan hasil penelitian. Bagian ini bertujuan untuk memaparkan data hasil penelitian di lapangan, baik data primer maupun data sekunder, yang terkait dengan perencanaan komunikasi dalam pengembangan wisata budaya di Provinsi Riau. Dalam pembahasan, hasil temuan tersebut akan didiskusikan, dan memberikan pemahaman yang mendalam dari penelitian ini.

BAB V

Bab V merupakan bagian penutup, merangkum kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Di sini, penulis menyoroti temuan utama dan merumuskan kesimpulan secara komprehensif. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya, membuka potensi pengembangan lebih lanjut dalam bidang yang telah dieksplorasi.